

KONDISI DAN PROSPEK PENGEMBANGAN EKSISTING RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK DI KOTA SURAKARTA

Oleh:
Arum Mastuti

**Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50139

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The existence of green open space continues to decrease as a result of development. Reduction in the quantity of green open space which is very significant in urban areas, causes in lower quality of urban public green open space as a consequence of the development of the city that needs a lot of land. Though the existence of public green open space is needed as one of the important elements of the urban.

This research was conducted with the aim to know how the existing condition, external and internal environment aspects in the management of green open spaces by the government that affect the prospect of development of existing green open space in the future in Surakarta. The results showed that there is a big gap between the percentages of obligations (20%) with a percentage of the existing condition of public green open space that exists (9.17%). The problem of green space in the city is related with the poor distribution and maintaining of green space, ineffective implementation of the regulation, budget and land limitation for the development.

The recommendation could be made to the Government of Surakarta by arranging law enforcement related to the environment, good physical planning, and standardization of for human resources recommendation in the institutions which is responsible to manages of green spaces, direct the activities of Corporate Social Responsibility (CSR) for public green open spaces. In addition, look for alternative fulfillment of public green space area with the acquisition of private land, the revitalization of green space that has undergone over the function, or through the development of green space in the special functions.

Keywords: *Condition, Prospect, Existing, Public Green Open Space Development*

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk perkotaan baik yang berasal dari pertumbuhan alami maupun migrasi menimbulkan berkembangnya penduduk dan kegiatan masyarakat kota. Tentu saja hal itu akan mengakibatkan peningkatan permintaan terhadap kebutuhan akan lahan dan ruang di perkotaan. Arus urbanisasi yang cukup tinggi, distribusi lahan yang tidak merata, merupakan masalah yang mendesak dan tidak dapat dicegah karena merupakan konsekuensi dari resiko pembangunan suatu kota.

Selain pertumbuhan penduduk yang tinggi, semakin tingginya intensitas pembangunan di kawasan perkotaan memberi pengaruh terhadap berkurangnya lahan tak terbangun. Semakin banyaknya jumlah penduduk maka akan semakin banyak ruang yang dibutuhkan. Sedangkan jumlah ruang tidak dapat bertambah, maka yang terjadi adalah alih fungsi lahan yang semula adalah ruang tak terbangun (sawah, tanah kosong, lapangan) yang beralih fungsi menjadi area perumahan, kawasan komersil, dan infrastruktur serta sarana dan prasarana pendukung perkotaan.

Terjadinya perubahan fungsi lahan menjadi hal yang lumrah terjadi di

kawasan perkotaan.¹ Pembangunan kawasan komersil skala besar, bahkan dengan konsep *high-rise building* bermunculan di Kota Surakarta selama 6 tahun terakhir. Baik berupa hunian vertikal, hotel, rumah sakit serta *mall* baru banyak didirikan terutama di pusat kota Surakarta bagian tengah yang jadi semakin padat. Suatu bentuk, proses, dan dampak perkembangan negatif dapat menciptakan suatu kondisi kehidupan yang tidak mendukung terciptanya suasana perkotaan yang *liveable*.²

Kota Surakarta memiliki potensi dan peluang yang sangat tinggi dalam hal perkembangan kawasan dan alih fungsi lahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kota Surakarta menjadi pusat pertumbuhan bagi daerah sekitarnya yang mengakomodir aktivitas yang berasal dari Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, Boyolali, Wonogiri dan Klaten. Kota Surakarta juga mengemban fungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah bahkan dengan ditetapkannya wilayah ini sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Tak hanya aktivitas ekonomi dan sosial, Kota

¹ Sudjarto, Djoko. (2001). *Pengantar Planologi*. Bandung: ITB. Hal. 139

² Sabari Yunus, Hadi. (2008). *Dinamika Wilayah Peri-Urban Determinan Masa Depan Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal.2

Surakarta juga memiliki 3 perguruan tinggi negeri dan lebih dari 40 perguruan tinggi swasta meningkatkan kebutuhan tempat tinggal bagi mahasiswa (kos-kosan) dan sektor pendukung lainnya semakin tinggi.

Dinamika pertumbuhan dan perkembangan Kota Surakarta perlu diimbangi dengan adanya kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik ditengah perkembangan fisik kota, pola pemukiman yang tidak teratur dan tingginya biaya pembangunan infrastruktur kota. Pembangunan yang kompulsif ini tidak diiringi dengan penambahan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik.

Meningkatnya jumlah, kebutuhan, dan aktivitas masyarakat menyebabkan terjadinya persaingan penggunaan tanah atas berbagai kegiatan terutama kegiatan ekonomi. Persaingan penggunaan tanah yang terjadi menyebabkan ruang yang seharusnya dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dibangun untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kegiatan lain, karena Ruang Terbuka Hijau (RTH) dipandang tidak menguntungkan secara ekonomis, misalnya: Jalur Hijau dihilangkan untuk membuat jalur *in-out* kawasan hotel.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dapat menjadi alat yang komprehensif untuk perlindungan kelestarian lingkungan jangka panjang melalui peningkatan kualitas hidup dan kualitas udara, mengurangi suhu panas perkotaan, dan meningkatkan nilai properti dalam hal estetika dan kenyamanan sebagai fasilitas rekreasi dan fasilitas relaksasi yang mudah diakses, dapat menampung kegiatan masyarakat dan memadai baik secara kualitas dan kuantitas.³

Komposisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Surakarta belum ideal karena ruang terbuka di lahan privat masih mendominasi penyediaan area khusus tanaman, dibanding RTH di lahan publik. Berdasarkan pemetaan terbaru, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Kota Surakarta masih berkisar 9,72%. Sementara RTH privat yang harusnya 10%, saat ini sudah lebih dari 20%.

Penelitian ini mencoba mendeskripsikan kondisi eksisting Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dan menganalisis prospek akselerasi pengembangan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di masa mendatang.

³ Dikutip dengan perubahan dari *Journal of Environmental Protection*.(2011, 2, 601-608).Shah Md. Atiqul Haq.(2011). *Urban Green Spaces and an Integrative Approach to Sustainable Environment*. Available from file.scirp.org

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Kota Surakarta. Dalam memilih informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* di mana pemilihan sampel sumber data berdasarkan dengan pertimbangan tertentu yakni orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang apa yang peneliti tanyakan sehingga akan memudahkan untuk mengetahui objek yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan, DLH Kota Surakarta, Penggiat Forum Solo Hijau, dan Civitas Akademik; Fakultas Teknik Perencanaan Wilayah Kota UNS. Jenis data yang digunakan berupa kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. Teknik Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data.⁴

Analisis data melalui sembilan langkah mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman. Peneliti menggunakan analisis lingkungan dalam mengidentifikasi faktor-faktor eksternal dan internal. Hasil analisis lingkungan disederhanakan ke dalam analisis SWOT yang mempengaruhi prospek pengembangan eksisting RTH Publik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KONDISI EKSISTING RTH PUBLIK

Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sampai dengan tahun 2016 prosentasenya 9,17%. Prosentasenya mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, karena perubahan cara perhitungan luasan dan perubahan klasifikasi jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik, pesatnya pembangunan, penataan koridor/saluran yang dampaknya mengurangi tidak hanya jalur hijau, tapi juga Ruang Terbuka Hijau Publik secara keseluruhan. Prosentasenya justru berkurang karena selain alasan tadi, ternyata ada 2 RTHP jenis TPU yang dikelola oleh DKP, ternyata berada di Kabupaten Sukoharjo, sampai tahun 2013 belum ada data yang kami sepakati untuk perhitungan RTHP jenis Hutan Kota dan sampai akhirnya pada tahun

⁴ Moleong.(2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.Hal.330

2015, kami melakukan pemetaan tutupan vegetasi yang dilakukan oleh SKPD terkait seperti BLH, DKP, DTRK, dll, yang ternyata hasilnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik kurang dari 10%.

Kondisi fisik Ruang Terbuka Hijau Publik minim pemeliharaan, masih terdapat banyak sampah, tanaman yang tidak terawat, monumen yang hilang atau rusak, fasilitas taman yang rusak dan *vandalism*.

B. STRATEGI

Identifikasi strategi saat ini adalah bentuk pemeriksaan manajemen dengan menemukan, mengumpulkan, meneliti, data dan informasi dari situasi strategi organisasi, dengan kerangka kerja evaluasi terhadap aspek kinerja suatu organisasi. Pendekatan strategi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik didasarkan pada aspek-aspek yang mempengaruhi strategi pengelolaan, yaitu pengaturan teknis, pengaturan penyelenggaraan. **Aspek fungsional** meliputi perencanaan dan pengaturan penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dengan implementasinya. Aspek fungsional menjadi penting dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sebagai implementasi dari adanya

penyelenggaraan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik.

1. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Kota Surakarta

Penyelenggaraan kegiatan perencanaan terkait Ruang Terbuka Hijau di suatu wilayah perkotaan telah diatur dalam berbagai regulasi baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sehingga pelaksanaannya menjadi lebih terarah yang tercantum pada UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Surakarta tercantum dalam dokumen perencanaan seperti: Perda No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Surakarta Tahun 2011-2031, Perda Nomor 10 tahun 2015 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021, selain rencana penyelenggaraan RTH Publik di dalamnya juga mencakup strategi dan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pengembangan RTH Publik. Strategi dan rekomendasi kebijakan

terkait RTH Publik tercantum dalam: Dokumen Target Capaian RTH Kota Surakarta sampai dengan tahun 2021 dan Rekomendasi Kebijakan dan Strategi dalam Buku Laporan Hasil Pemetaan Tutupan Vegetasi Tahun 2015 untuk Rencana Kerja Tahun 2016-2021.

2. Mandat Organisasi Perangkat Daerah

Pelaksanaan tindakan sesuai dengan tugas dan wewenang, semua organisasi berpedoman pada Perwali No. 27-C Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

Dinas Lingkungan Hidup selaku pengelola teknis RTH melaksanakan tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan salah satu fungsinya adalah penyusunan rencana program, pengendalian evaluasi dan pelaporan.

3. Visi, Misi dan Tujuan Organisasi Perangkat Daerah

Sinkronisasi visi organisasi penting dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik untuk mewujudkan RTH Kota Surakarta yang memenuhi ketentuan yakni 20% harus

memanfaatkan visi, misi dan tujuan yang telah ada, dan mendukung sebagai bentuk dalam pelaksanaan mandat organisasi.

Ketika visi, misi dan tujuan OPD telah dilaksanakan secara optimal sehingga dapat memenuhi kebutuhan sosial dan politik yang ada dalam masyarakat, memberikan tanggapan yang baik dengan *stakeholders*.

Strategi pembangunan daerah dirumuskan untuk menjalankan misi guna mendukung terwujudnya visi seperti untuk lima tahun kedepan adalah salah satunya dengan misi *“Terwujudnya Surakarta sebagai Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera.”* Dengan adanya misi untuk mewujudkan tata ruang wilayah, infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan, serta berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya, menunjukkan bahwa salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Surakarta adalah terwujudnya lingkungan yang berkelanjutan.

4. Kinerja Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah

Koordinasi dilakukan berdasarkan arahan Walikota dengan OPD terkait beserta Bappeda Kota Surakarta selaku perencana makro. Hal tersebut dilakukan

oleh Pemerintah Kota Surakarta agar setiap pembangunan yang akan dilakukan dapat dikoordinasikan dengan baik. Koordinasi dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surakarta dilakukan dengan memberikan arahan kepada OPD terkait agar dapat menjalankan tugas mereka masing-masing. Dalam koordinasi ini peran Walikota sangat penting. Koordinasi ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dikalangan OPD terkait.

Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik diperlukan koordinasi antar OPD terkait dan *developer* (lintas sektor) guna mengontrol pembangunan. Untuk mensinergikan pencapaian tujuan, Pemerintah Kota Surakarta tidak hanya melakukan komunikasi dan koodinasi antar OPD tetapi juga menjalin kerjasama dengan komunitas Forum Solo Hijau.

5. Kinerja Sumber Daya Manusia

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik membutuhkan Sumber Daya Manusia yang berpemikiran jauh ke depan untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik selanjutnya, sehingga perlu inovasi dan kreativitas meskipun SDM tersebut hanya bergerak sebagai operasional bukan SDM konseptual, yang pelaksanaannya tetap berpedoman pada

peraturan. Kualitas Sumber Daya Manusia seharusnya mampu mencakup keahlian dari aspek, *technical skill* dan *conseptual skill*.

Kota Surakarta memiliki kualitas Sumber Daya Manusia yang masih kurang baik. Tidak sesuainya kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Kota Surakarta disebabkan karena mekanisme penempatan pegawai yang kurang tepat. Banyak pegawai yang dipindah tugaskan tetapi tidak memiliki latar belakang yang sesuai dengan beban pekerjaan/tugas sehingga hal tersebut memiliki peluang atau kemungkinan memperlambat kinerja OPD terkait.

6. Kinerja Capaian Target Perencanaan Operasional

Pada tahun 2015, persentase Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Surakarta mencapai 9,17% menurun drastis jika dibandingkan tahun 2010 dengan presentase sebesar 18,23%. Kondisi tersebut menunjukkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Surakarta masih rendah karena masih berada jauh dari target yang ditetapkan. Untuk mendorong ketercapaian target dalam pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik, Pemerintah Kota Surakarta telah berupaya dengan membangun taman-

taman baru, dan melindungi kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik yang sudah ada, terutama kawasan Hutan Kota, Jalur Hijau, dan Lapangan. Sampai dengan tahun 2015, jumlah taman yang dibangun sudah mencapai 11 (sebelas) taman. Pemetaan RTH sendiri akan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup di tahun 2015.

Rendahnya perkembangan RTH Publik di Kota Surakarta, selain karena pembangunan yang *massive*, lahan pemerintah yang semakin berkurang, tetapi juga karena anggaran yang terbatas. Anggaran urusan wajib lingkungan hidup tahun 2016 yang masih tersebar di beberapa dinas dan UPTD tidak dapat terserap dengan maksimal. Alokasi untuk pengembangan RTH Publik masih sangat minim, dan anggaran terbesar digunakan untuk perawatan RTH Publik. Perawatan dan pengelolaan RTH Publik membutuhkan dana yang cukup besar terutama untuk taman kota dan taman sempadan.

C. ANALISIS LINGKUNGAN (SWOT)

1. Kekuatan (*Strength*)

- a. Kebijakannya dan komitmen Pemerintah Kota Surakarta yang diwujudkan melalui visi, misi dan

rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah untuk mewujudkan lingkungan yang berbudaya dan berkelanjutan

- b. Jalinan kerjasama yang baik dengan pihak lain (*networking*) dengan *sparring partner* dan Tim khusus yang kompeten, yang turut membantu pemerintah mewujudkan tujuannya
- c. Pemerintah memiliki perencanaan terkait pengembangan Ruang Terbuka Hijau yang realistis.

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Perbedaan pola pikir dan nilai dari Sumber Daya Manusia yang terlibat dan Sumber Daya Manusia tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
- b. Dokumen Perencanaan terkait RTH belum matang
- c. Organisasi Perangkat Daerah yang masih bersifat egosektoral, kurang koordinasi
- d. Anggaran dan lahan yang terbatas
- e. Kurangnya komunikasi dan partisipasi masyarakat.

3. Peluang (*Opportunities*)

- a. Ada kemungkinan akuisisi lahan privat sebesar 2,5 ha/tahun yang

dapat menambah luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

- b. Mendapatkan CSR (*Corporate Social Responsibility*)
- c. Membuat taman tematik, untuk menarik minat investor, yang sekaligus bisa membuka peluang bisnis dan komunitas

4. Ancaman (*Threats*)

- a. Lahan semakin banyak dikuasai oleh swasta
- b. Pertumbuhan kota yang cepat dan *massive*
- c. Tidak terpantaunya izin dokumen perencanaan
- d. Keputusan politik yang kontra dengan wawasan lingkungan berkelanjutan.

D. PROSPEK PENGEMBANGAN EKSISTING RTH PUBLIK

Kota Surakarta memiliki prospek dan potensi yang cukup besar dalam pengembangan eksisting Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di dukung dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan kondisi politik yang cukup kondusif (tidak banyak mengalami resistensi yang berlebihan dari masyarakat) di Kota Surakarta. Hanya saja dalam realisasi dari komitmen-komitmen tersebut memang

tidak mudah dan mengalami banyak hambatan dan kendala. Kesulitan pengelola perkotaan dapat dipahami mengingat kondisi berikut:

1. Pola perkembangan kawasan perkotaan yang umumnya masih bersifat ekstensif (*sprawling*), menyebabkan permintaan lahan menjadi sangat tinggi;
2. Lahan di kawasan perkotaan hampir dikuasai oleh masyarakat/swasta;
3. Tidak adanya pencadangan lahan yang dapat membantu pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan publik; dan
4. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk mengakuisisi lahan-lahan privat.

Ada beberapa konsep yang digunakan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik seperti terjadinya Perubahan Paradigma Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Perubahan paradigma terkait rencana pengembangan eksisting Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik menunjukkan adanya upaya revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sesuai fungsi dan peruntukannya, bukan menjadi ajang promosi terselubung ataupun menjadikan Ruang Terbuka

Hijau (RTH) Publik sebagai simbol/monument semata. Paradigma yang baru terkait dengan tujuan perencanaan Tata Ruang Hijau direncanakan untuk:

1. Mengembalikan Fungsi Ekologi dan Ekosistem Ruang Kota
2. Mengoptimalkan Fungsi Estetis dan Lansekap
3. Menciptakan Aktivitas Sosial Masyarakat di tingkat Lingkungan; Harus terjadi interaksi antara Lokasi, Fungsi dan Bentuk Ruang Terbuka Hijau dengan *Activity Support* di ruang kota; Ruang Terbuka Hijau dapat menciptakan aktivitas dan menjadi bagian dari Fungsi Aktivitas Ruang Publik

Hal tersebut mampu menjadi alternatif yang akan mempermudah para pemangku kepentingan merealisasikan rencana pengembangan eksisting Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik. Pemerintah Kota memiliki beberapa peluang untuk dijadikan potensi yang dapat mendukung teralisasinya rencana pengembangan eksisting Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik, seperti:

1. Pemerintah sudah memiliki target capaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik yang realistis;

2. Pemerintah sudah mengantisipasi keterbatasan lahan dengan memanfaatkan lahan negara untuk membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik fungsi khusus; peluang dengan mewajibkan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik bagi permohonan izin pemanfaatan ruang dengan nilai investasi tertentu. Dengan pola ini, lokasi RTH berada di luar lokasi pemanfaatan ruang investor namun tetap disesuaikan dengan penetapan lokasi dalam rencana tata ruang. Sedangkan luas dan desainnya disesuaikan dengan anggaran yang disediakan pihak swasta. Pemerintah juga dapat memaksimalkan penggunaan lahan di kawasan pinggir perkotaan yang masih belum banyak lahan terbangun yang dapat dilestarikan sebagai areal sabuk hijau.
3. Pemerintah sudah mengantisipasi keterbatasan anggaran dengan melakukan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik secara bertahap untuk mengurangi beban pembiayaan yang terlalu besar; dan Pemerintah memiliki peluang untuk mengarahkan kegiatan CSR ke bidang lingkungan hidup khususnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik,

- mengingat potensi dan daya saing kawasan yang dimiliki Kota Surakarta;
4. Pemerintah memiliki *sparring partner* dengan Forum Solo Hijau dan memiliki Tim khusus yang mendukung penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik yang ideal;
 5. Kebutuhan masyarakat perkotaan atas fasilitas publik yang dapat mewadahi kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas sosial seperti komunitas/ olahraga/ rekreasi/ bisnis yang dilakukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik yang semakin tinggi. Mengingat banyaknya lapisan masyarakat di Surakarta mulai dari pelajar, mahasiswa sampai masyarakat umum yang dapat memanfaatkan fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik. Sebagai contoh: pengadaan Taman Tematik (*Pet Park*: yang bisa dimanfaatkan oleh komunitas pecinta hewan, dan tema yang lain). Hal ini juga bisa menjadi daya tarik investasi bagi investor di bidang yang bersangkutan.

Prospek dan potensi pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik akan semakin besar apabila didukung dengan proses pengelolaan, pemeliharaan dan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Publik eksisting yang lebih baik, serta personalia/SDM yang berwawasan lingkungan berkelanjutan dan berdedikasi untuk mewujudkan Kota Hijau.

IV. PENUTUP

Kondisi eksisting Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik baik dilihat dari prosentase dan fisik masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Peningkatan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Surakarta tidak diiringi oleh peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau yang ada. Sulitnya penyelenggaraan dan pengembangan yang signifikan atas eksisting Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Surakarta disebabkan oleh *Gap* yang terlalu besar antara kondisi eksisting dengan kewajiban pemenuhan ruang terbuka hijau sesuai amanat regulasi; Lahan yang terbatas; Alokasi anggaran yang belum terserap maksimal. Belum didukung dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* ataupun kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaannya; Tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan.

Terdapat prospek dan potensi yang cukup besar terkait pengembangan eksisting Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Publik di Kota Surakarta. Pemenuhan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik tidak selalu berarti pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik baru, namun dapat dilakukan melalui akuisisi lahan privat, revitalisasi RTH yang sudah mengalami alih fungsi, atau melalui pengembangan RTH pada fungsi khusus seperti RTH sempadan sungai, rel, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong.(2007). *Metode Penelitian Kualitatif* .Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sudjarto, Djoko. (2001). *Pengantar Planologi*. Bandung: ITB.
- Sabari Yunus, Hadi. (2008). *Dinamika Wilayah Peri-Urban Determinan Masa Depan Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dikutip dengan perubahan dari *Journal of Environmental Protection*.(2011, 2, 601-608).Shah Md. Atiqul Haq.(2011). *Urban Green Spaces and an Integrative Approach to Sustainable Environment*. Available from file.scirp.org